

AKUNTANSI LEMBAGA PUBLIK



Tim Penulis :

Sri Adella Fitri
Amelia Rahmadani
Chindy Aulia
Widya Putri
Fahzilan Syahirah
Salsabilla Marimer
Repi Widia Sari
Siti Aissya

Agil Suryani
Suci Rahma Dani
Rezika Dia Fitri
Fani Adelia Listin
Silvia Febriyanti
Anggy Marsely
Sri Delvianas
Silvia Rahnila

Editor : Muhamad Rizal Kurnia

AKUNTANSI LEMBAGA PUBLIK

**Sri Adella Fitri
Amelia Rahmadani
Chindy Aulia
Widya Putri
Fahzilan Syahirah
Salsabilla Marimer
Repi Widia Sari
Siti Aissya
Agil Suryani
Suci Rahma Dani
Rezika Dia Fitri
Fani Adelia Listin
Silvia Febriyanti
Anggy Marsely
Sri Delvianas
Silvia Rahnila**

AKUNTANSI LEMBAGA PUBLIK

Penulis:

Sri Adella Fitri
Amelia Rahmadani
Chindy Aulia
Widya Putri
Fahzilan Syahirah
Salsabilla Marimer
Repi Widia Sari
Siti Aissya
Agil Suryani
Suci Rahma Dani
Rezika Dia Fitri
Fani Adelia Listin
Silvia Febriyanti
Anggy Marsely
Sri Delvianas
Silvia Rahnila

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 203**
QRSBN : **62-0115-00438-4**
Terbit Pada : **Juli 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat atas iman, nikmat atas Islam, nikmat Kesehatan yang diberikan, nikmat kelapangan waktu dan kesempatan berharga serta berbagai nikmat lainnya yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibalas. Shalawat dan salam selalu dihaturkan dan tucurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok figur tauladan yang tidak pernah habis keunggulan pribadinya untuk diselami, baik dari semua sikap, semua sifat dan semua praktik dalam keseharian beliau. Beliau adalah sosok sempurna yang tidak bisa tergantikan sampai akhir zaman. Dari beliau kita mendapatkan petunjuk indah Islam dan nikmatnya iman. Untuk Beliau kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Kiamat nanti.

Alhamdulillah atas terselesaikannya Buku “Akuntansi Lembaga Publik” yang berhasil ditulis bersama-sama oleh mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Angkatan 2021 dalam masa perkuliahan Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terbitnya buku ini, terutama keluarga yang memberikan dukungan penuh, Ibu, suami, anak-anak dan saudara-saudara. Para sahabat dan rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Organisasi yang berorientasi non laba merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan dan program-program untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Organisasi non laba memiliki jenis dan kategorinya, ada yang bergerak dibidang keagamaan seperti masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya, bidang pendidikan seperti sekolah negeri, jasa kesehatan seperti klinik kesehatan dan rumah sakit,

bidang politik seperti partai politik, bidang sosial seperti LSM, NGO yang bergerak dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan perundang-undangan, organisasi yang membela buruh atau serikat buruh, asosiasi/organisasi profesional, institusi riset, museum, dan lain-lain.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab, yaitu: Akuntansi Organisasi Nirlaba, Prinsip-prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba, Pengelolaan Keuangan Yayasan, Pengelolaan Keuangan LSM, Pengelolaan Keuangan Masjid, Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit, Pengelolaan Keuangan Pesantren, Pengelolaan Keuangan Partai Politik, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan BLUD, Pengelolaan Keuangan BUMDesa, Pengelolaan Keuangan Lembaga ZIS, Konsep *Value For Money*, Konsep *Balance Scorecard*, Akuntabilitas Lembaga Publik, Analisis Rasio Keuangan Lembaga Publik.

Tujuan dari penulisan Buku ini adalah untuk menambah wawasan mengenai Akuntansi Lembaga Publik, sehingga pembaca. Buku ini dapat mengenal dan mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang bagaimana akuntansi publik. Kami menyadari bahwa dalam penulisan Buku ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang konstruktif akan sangat kami tunggu dan kami harapkan. Semua ilmu yang kami miliki adalah ilmu yang baik dan hanyalah berasal dari Allah SWT *Rabb al 'alamin*, tidak ada daya dari diri ini yang *al faqir* atasnya. Semua kesalahan dan semua kekeliruan di dalamnya menunjukkan bahwa betapa terbatasnya ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Semoga Buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam pengetahuan tentang Akuntansi Lembaga Publik.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA.....	1
Pendahuluan	1
Basis Pencatatan Akuntansi.....	2
Persamaan Dasar Akuntansi pada Organisasi Nirlaba	2
Fungsi dan Tugas Akuntansi	3
Konsep Dasar ISAK 35	4
Daftar Pustaka.....	9
Profil Penulis	10
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA	11
Pendahuluan	11
Konsep Dasar ISAK 35	12
Organisasi Sektor Publik (Nirlaba)	13
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Swasta	14
Kesamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta	15
Pendapatan Organisasi Nirlaba.....	16
Prinsip Akuntansi Secara Umum.....	17
Prinsip-Prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba.....	18
Penerapan Prinsip Akuntabilitas	20
Daftar Pustaka.....	21
Profil Penulis	22
BAB 3 PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN	23
Pendahuluan	23

Organisasi Nirlaba	24
Pengertian Yayasan	24
Tujuan Yayasan.....	25
Bentuk – bentuk Yayasan.....	25
Syarat Pendirian Yayasan	27
Sumber Pembiayaan/ Kekayaan Yayasan	28
Pengertian Pengelolaan Yayasan	28
Perencanaan Anggaran Keuangan Yayasan.....	28
Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan Yayasan.....	29
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Yayasan	32
Dimensi Akuntabilitas Yayasan.....	32
Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Yayasan.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	36
BAB 4 PENGELOLAAN KEUANGAN LSM.....	37
Pendahuluan	37
Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	38
Gagasan Dalam Pembangunan LSM.....	39
Aktivitas Dalam Melakukan Pengembangan LSM.....	41
Mengkategorikan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Garis Besar	43
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	44
Kegunaan LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	44
Tujuan Pemerintah Untuk LSM.....	45
Kedudukan LSM Untuk Perkembangan Masyarakat	46
Pengelolaan Keuangan Pada LSM	47
Daftar Pustaka.....	49

Profil Penulis.....	50
BAB 5 PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID	51
Pengertian Pengelolaan Keuangan Masjid	51
Perolehan dan Kegunaan Keuangan Masjid.....	53
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Masjid	54
Unsur-Unsur ISAK No. 35.....	56
Kelemahan Pengelolaan Keuangan Masjid.....	57
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
BAB 6 PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT	62
Pendahuluan	62
Definisi Rumah sakit	63
Misi dan Tujuan Rumah Sakit	64
Jenis-jenis Rumah Sakit	65
Penggunaan Manajemen Rumah Sakit.....	67
Komite Etika Rumah Sakit.....	68
Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	70
Daftar Pustaka.....	74
Profil Penulis.....	75
BAB 7 PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN	76
Pendahuluan	76
Pondok Pesantren	77
Tujuan dan Fungsi Pesantren	77
Unsur-unsur Pesantren.....	78
Konsep Dasar Manajemen Keuangan Pondok Pesantren.....	79
Tujuan Manajemen Keuangan Pesantren	80
Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pondok Pesantren.....	81
Pengelolaan Keuangan Pesantren	82

Strategi Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren	84
Daftar Pustaka	86
Profil Penulis	87
BAB 8 PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....	88
Pendahuluan	88
Fungsi dan Peranan Partai Politik	89
Sumber Keuangan Partai Politik.....	90
Dasar Hukum Keterbukaan Partai Politik.....	91
Akuntabilitas Partai Politik.....	92
Pelaporan Dana Kampanye.....	93
Akuntabilitas Dana Kampanye	93
Realitas Pelaporan Keuangan Partai Politik	96
Pengeluaran Partai Politik.....	97
Daftar Pustaka.....	98
Profil Penulis.....	99
BAB 9 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	100
Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	100
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	101
Dasar Hukum Keuangan Desa	102
Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	103
Struktur Pengelolaan Keuangan Desa	105
Risiko dan Tantangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	107
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis	110
BAB 10 PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD	111
Latar Belakang	111
Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	111
Tujuan Badan Layanan Umum Daerah.....	112

Asas - Asas Badan Layanan Umum Daerah	113
Syarat, Penentuan, dan Pencabutan Status BLUD.....	113
Pendapatan BLUD.....	116
Fleksibilitas BLU/ BLUD	117
Optimalisasi Peran Badan Layanan Umum Daerah	120
Kelembagaan, Pejabat Pengelolaan, dan Kepegawaian.....	122
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD).....	123
Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah	124
Daftar Pustaka.....	125
Profil Penulis.....	126
BAB 11 PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES	127
Konsep Dasar Organisasi BUMDes	128
Landasan Hukum BUMDes.....	129
Tujuan BUMDes	130
Jenis Usaha yang Dijalankan BUMDes	131
BUMDes dan Penguatan Ekonomi Desa.....	132
Tugas, Hak, dan Kewajiban Pengurus BUMDes.....	134
Pengelolaan Keuangan pada BUMDes	136
Daftar Pustaka.....	137
Profil Penulis.....	138
BAB 12 PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA ZIS.....	139
Definisi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah	139
Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembaga ZIS.....	140
Jenis Laporan Keuangan Pengelolaan ZIS.....	141
Peran Sistem Informasi Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	143

Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109).....	145
Daftar Pustaka.....	149
Profil Penulis.....	150
BAB 13 VALUE FOR MONEY	151
Pendahuluan	151
Pengertian <i>Value for Money</i>	152
Konsep <i>Value for Money</i>	153
Pengukuran <i>Value for Money</i>	155
Daftar Pustaka.....	159
Profil Penulis.....	160
BAB 14 KONSEP <i>BALANCED SCORECARD</i>	161
Pendahuluan	161
Konsep dan Perkembangan <i>Balanced Scorecard</i>	162
Organisasi Sektor Publik pada <i>Balanced Scorecard (Public Sector Scorecard)</i>	163
Perumusan Strategi Sektor Publik pada <i>Balanced Scorecard</i> .	168
Perencanaan Strategik Sektor Publik pada <i>Balanced Scorecard</i>	170
Penyusunan Program pada <i>Balanced Scorecard</i>	170
Tahap Penganggaran pada <i>Balanced Scorecard</i>	172
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	174
BAB 15 AKUNTABILITAS LEMBAGA PUBLIK	175
Pendahuluan	175
Pengertian Akuntabilitas Lembaga Publik.....	176
Prinsip-prinsip Akuntabilitas	179
Macam-macam Akuntabilitas	179
Jenis Akuntabilitas.....	182

Alat-alat Akuntabilitas.....	185
Indikator Keberhasilan Akuntabilitas.....	186
Aspek-aspek Akuntabilitas.....	187
Aspek-aspek Akuntabilitas Pada Organisasi Pemerintah	187
Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik.....	188
Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi Indonesia	190
Daftar Pustaka.....	191
Profil Penulis.....	192
BAB 16 ANALISIS RASIO KEUANGAN LEMBAGA SEKTOR PUBLIK	193
Pengertian Sektor Publik	193
Pengertian Analisis Rasio	194
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.....	195
Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	197
Rasio Aktivitas.....	199
Pelepasan Dana per Triwulan.....	200
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	201
Daftar Pustaka.....	202
Profil Penulis.....	203

BAB 1

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Berbagai bentuk organisasi yang melakukan pengelolaan keuangan dalam program dan kegiatannya berujung pada suatu keputusan yang dipengaruhi kondisi kesehatan keuangannya, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang dialami oleh organisasi. Keputusan ini lebih dikenal dengan istilah Keputusan Ekonomi. Pihak yang berkepentingan dan yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi terkait kinerja ekonomi yang diperoleh dan kondisi suatu organisasi, ini disebut dengan istilah Informasi Ekonomi. Untuk menata dan melakukan pengelolaan dokumen ekonomi dengan baik, maka diperlukan sumber daya yang memiliki kapasitas yang memadai yang mampu mengadministrasikan dokumen atas transaksi ekonomi untuk memperoleh informasi ekonomi yang tepat, sesuai dan memadai untuk pengambilan keputusan oleh para *stakeholders*.

Organisasi yang berorientasi non laba merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan dan program-program untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Organisasi non laba memiliki jenis dan kategorinya, ada yang bergerak dibidang keagamaan seperti masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya, bidang pendidikan seperti sekolah negeri, jasa kesehatan seperti klinik kesehatan dan rumah sakit,

Neraca lajur atau disebut juga kertas kerja pembantu yang digunakan dalam proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja pada neraca lajur tidak komponen utama dalam rangkaian siklus akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, tetapi neraca lajur berguna untuk membantu penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi lebih mudah dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat penyusunan laporan keuangan.

Laporan Penghasilan Komprehensif yang terdapat dalam ISAK 35 bahwa organisasi yang berorientasi pada nonlaba akan melakukan penyesuaian deskripsi atas laporan keuangan tersebut. Penyesuaian laporan keuangan yang dilakukan tidak dibatasi sepanjang masih mencerminkan fungsi yang benar dan sesuai antara judul dengan isi laporan keuangan, dan tidak mengurangi kualitas dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan saldo akhir dari aset neto. Nilai aset neto diperoleh dari jumlah aset neto total tanpa pembatasan ditambah surplus/defisit dan jumlah total aset neto dengan pembatasan.

Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan/neraca adalah gambaran dari aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset neto. Laporan posisi keuangan menggambarkan saldo akhir dari jumlah aset yang dimiliki secara total, jumlah kewajiban secara total yang harus segera dibayarkan, serta jumlah dari aset neto total.

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas pada masa satu periode tertentu, laporan arus kas menggambarkan informasi atas sumber-sumber kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan yang terjadi pada setiap kegiatan dalam periode tertentu. Klasifikasi kas yang dilaporkan berasal dari 3 aktivitas yaitu, aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Saldo akhir yang terdapat pada laporan arus kas memiliki jumlah/nilai yang sama dengan jumlah kas yang terdapat pada laporan posisi keuangan, jika terjadi ketidaksetaraan maka terjadi kesalahan dalam proses pencatatan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah peningkatan transparansi atas laporan yang disajikan secara rinci atas akun-akunnya. CaLK bagian penting dari laporan keuangan dan tidak dapat dipisahkan. CaLK memuat penjelasan rinci tentang profil organisasi,

kondisi makro ekonomi, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta angka-angka yang terdapat pada masing-masing akun yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi-informasi non keuangan penting lainnya.

Jurnal Penutup adalah tahapan akhir dari siklus akuntansi setelah menyusun laporan keuangan pada akhir periode. Dalam jurnal penutup bertujuan untuk menutup akun nominal kemudian menyiapkan neraca akhir yang digunakan pada periode berikutnya.

Neraca Saldo Setelah Penutupan merupakan proses posting dari jurnal penutup ke buku besar dari masing-masing akun nominal. Akun nominal harus ditutup (pendapatan dan beban) sehingga saldo akhirnya nol, maka yang masih bersaldo pada akhir periode adalah akun riil.

Daftar Pustaka

- Bahri, Syahrul, 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Jakarta : PT Grasindo
- Hery, 2015. Pengantar Akuntansi. Jakarta : PT Grasindo, anggota IKAPI
- Herry, 2016. Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition. Jakarta : PT Grasindo
- Nur, Sri Wahyuni, 2020. Akuntansi Dasar Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Makasar : Cendekia Publisher
- Darya, I Gusti Putu, 2019. Akuntansi Manajemen. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia,
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2018. ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2017. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2019 PSAK (1). Jakarta

PROFIL PENULIS



Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.

Ketertarikan penulis mendalami akuntansi sektor publik dimulai pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan karena penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 2 dengan memilih keilmuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan. Penulis memiliki keilmuan dibidang Akuntansi, melalui pendidikan formal S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Andalas dan S2 pada Program Pascasarjana, program studi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Andalas. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, dan melakukan berbagai pengabdian di bidang ilmu akuntansi. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti dan melakukan pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sriadellafitri1234@gmail.com

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP

AKUNTANSI ORGANISASI

NIRLABA

Amelia Rahmadani

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akuntansi nirlaba adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba atau sektor publik yang digunakan sebagai pengelolaan dalam keuangan mereka. Tujuan utama akuntansi nirlaba yakni untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam membantu organisasi nirlaba, mengelola keuangan dengan benar. Dalam akuntansi nirlaba, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba. Tujuan adanya prinsip ini nantinya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat oleh organisasi nirlaba akurat dan dapat diandalkan. Prinsip yang saling ketergantungan mengharuskan organisasi nirlaba untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ada, seperti peraturan perpajakan dengan peraturan pelaporan keuangan. Laporan keuangan akan memberikan informasi penting kepada para donatur dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting bagi organisasi nirlaba untuk mengikuti prinsip akuntansi nirlaba dengan benar dan menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan andal.

Dalam akuntansi nirlaba, laporan keuangan sangatlah penting dikarenakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi. Laporan keuangan organisasi nirlaba

juga harus mematuhi standar akuntansi yang relevan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar dan dapat dibaca. Selain itu, organisasi nirlaba harus memahami dan menerapkan prinsip akuntansi nirlaba tertentu yang berbeda dari organisasi laba. Diskusi dalam akuntansi nirlaba sering kali mencakup topik seperti menyiapkan laporan keuangan, menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran, mengelola aset dan kewajiban, dan mematuhi peraturan perpajakan.

Pengoperasian akuntansi nirlaba melibatkan persiapan, pengelolaan, dan audit laporan keuangan entitas nirlaba. Dalam mengelola akuntansi entitas nirlaba, penting untuk memahami prinsip dan standar akuntansi organisasi nirlaba yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Ini membantu organisasi nirlaba mencapai tujuan mereka yang secara ekonomis dan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Konsep Dasar ISAK 35

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) adalah membuktikan:

1. ISAK 35 yang akan menyusun tentang laporan keuangan organisasi nirlaba.
2. Perubahan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada pos-pos keuangan.
3. PSAK 1 (amandemen 2019) tentang penyajian laporan keuangan.
4. PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45: penyajian laporan keuangan dalam hal terjadi pembatalan.
5. ISAK 35 diubah menjadi PSAK 1, PPSAK 13 berlaku pada periode keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.
6. Sifat dari organisasi nirlaba berbeda dengan entitas laba. Pembedanya adalah bagaimana organisasi nirlaba memperoleh sumber daya kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Sebuah organisasi nirlaba menerima sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau memanfaatkan keuangan dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai hasil dari sifat ini, terdapat transaksi tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam entitas, misalnya saat menerima hadiah (Safitri et al., 2022).

nomor 116 dan nomor 117. Standar ini berlaku untuk semua organisasi nirlaba pemerintahan, membantu standarisasi akuntansi dan laporan keuangan di sektor nirlaba. Selain itu, FASB mengeluarkan pendapat nomor 124 dan nomor 135 terkait dengan organisasi nirlaba (Suci, 2013).

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

1. Penerapan Prinsip Visi Strategis, Visi dan misi adalah bagian dari rencana strategis yang dapat berorientasi di waktu mendatang.
2. Penerapan Prinsip Profesionalisme, Organisasi nirlaba melakukan kegiatan dengan profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Penerapan Prinsip Responsibilitas, Tanggung jawab yakni jenis upaya untuk mematuhi hukum dan peraturan profesi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masalah masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Penerapan Prinsip Efisien dan Efektivitas, Karakteristik efisien dan efektivitas relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Swadaya et al., 2020).

Daftar Pustaka

- Board, F. F. A. S. (1993). Statement of Financial Accounting Standards n° 117, "Financial Statements of Not-for-Profit Organizations." In *FASB, Norwalk*.
- Heryana, A. (2012). *Pendanaan Organisasi Nirlaba | Ade Heryana, SSt, MKM*. 1–11.
- Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Permadi, L. A., & Iswanto, D. (2017). Analisis Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kota Semarang. In *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 17, Issue 8).
- Pontoh Winston. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1tfw0xp.32>
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Tpq Al-Barokah Pekalongan. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 2(2), 37–50. <https://doi.org/10.56696/jaka.v2i2.5415>
- Suci, D. (2013). Pengaruh Penerapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sulistiawan, D. (n.d.). *Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate*. Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate. (n.d.). (n.p.): Elex Media Komputindo.; Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=NQrGVZr7XdK>
- Swadaya, L., Jakarta, S. S., No, J. R., & Timur, J. (2020). *Ekonomi & Keuangan Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan, Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan Adam)*. 27(1), 1–7. <http://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/dsn>
- WILSON, E. R., RECK, J. L., KATTELUS, S. C., & Robbins, W. A. (2010). Accounting for Governmental and Nonprofit Entities . In *Issues in Accounting Education* (Vol. 25, Issue 1). <https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.1.176>

PROFIL PENULIS



Amelia Rahmadani

Penulis lahir di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Desember 2002. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Naldi Hendri dan Ida Riani sebagai kedua dari dua bersaudara. Pada saat ini penulis bertempat tinggal di Jorong Tiga Batur, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Telaga Asih 01 (tamat 2015), melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cikarang Barat (tamat 2018), dan melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Cikarang Barat, hingga bisa duduk dibangku perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Alasan penulis memilih Program Studi Akuntansi Syariah dikarenakan ingin mengembangkan ilmu dan skill pada masa SMK dan ingin fokus di dunia Keuangan.

Penulis juga sudah aktif didunia organisasi sejak masa Sekolah Menengah Pertama. Pada masa sekolah penulis aktif dalam organisasi ekstrakurikuler dan pada masa kuliah sekarang ini penulis berperan aktif menjadi Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah.

Email penulis: ameliaarahmadani84@gmail.com

BAB 3

PENGELOLAAN KEUANGAN

YAYASAN

Chindy Aulia

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Yayasan termasuk pada kategori golongan entitas nirlaba yang tidak mengedepankan kepentingan sendiri namun organisasi nirlaba kegiatan utamanya adalah mencoba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai sistem manajemen keuangan dikelola oleh organisasi swasta atau publik membuat organisasi menjadi unik. Memerintahkan untuk menyediakan layanan publik/rakyat adalah salah satu tujuan organ utama organisasi ini. Sesuai tujuan tersebut tentu saja diperlukan akuntabilitas pada pelaksanaannya. Akuntabilitas adalah indikator yang perlu dibuat organisasi manapun, baik swasta maupun publik.

Yayasan juga mempunyai payung hukum dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2004 perihal yayasan, dimana asas-asas akuntabilitas dan transparansi publik selain independensi yayasan menjadi badan aturan serta asas-asas nirlaba yang sebagai hal mendasar bagi suatu yayasan sebab golongan entitas nirlaba seperti yayasan berbeda dengan organisasi berorientasi pada keuntungan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak didorong oleh motif keuntungan (Yanuarisa, 2020).

Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Yayasan

Pengelolaan kekayaan yayasan berlangsung sebagai bentuk tanggung jawab yayasan dengan menentukan, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus, disini bendahara dan pengurus sebagai penanggung jawab, sebagai penanggung jawab. dasar pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan kekayaan yayasan, sistem pengendalian intern tidak terstruktur dan kaku seperti organisasi yang beroperasi pada keuntungan. Sistem pengendalian intern lebih bertumpu pada rasa saling percaya dan sikap kerja yang dilakukan berdasarkan keikhlasan sesuai dengan misi yang diemban oleh masing-masing anggota dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan kerajaan guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga kecurangan dapat dilakukan menghindari.

Pengendalian intern yayasan didasarkan pada kejujuran, saling percaya dan itikad baik terhadap sesama, yang memfasilitasi penggunaan laporan keuangan yayasan dan transparansi laporan. Sikap ini merupakan alat untuk menghindari penyelewengan dana dan menjadi motivasi bagi tugas masing-masing pengelola dana (Abhas, 2015).

Daftar Pustaka

- Abhas, W. S. (2015). Analisis Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan(Studi Kasus Pada Yayasan La-Royba Bali Bina Insani Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Profesi* .
- Anand, D. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45. *Jurnal Kajian Akuntansi* .
- Auliyah, M. (2021). *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Proses Pengelolaan Keuangan Yayasan Sultan Agung Tebuireng Jombang*. Jombang.
- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Wasisto, A. W. (2023). *Akuntansi Yayasan*. Agung Wahyu Wasisto.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Balance* .

PROFIL PENULIS



Chindy Aulia

Penulis dilahirkan dari keluarga yang sederhana di kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 Maret 2003. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Imran dan Yusmiati sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di perumahan Pagaruyung

Indah Permai, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 20 Kampung Baru (Tamat 2015), melanjutkan Sekolah ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batusangkar (Tamat 2018) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batusangkar (Tamat 2021), hingga saat ini menempuh masa kuliah di Universitas Mahmud Yunus Batusangkar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Akuntansi Syariah. Alasan penulis memilih jurusan Akuntansi Syariah dikarenakan adanya ketertarikan pada ilmu hitungan yang memiliki prospek kerja yang luas.

Penulis juga aktif di organisasi baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Organisasi yang aktif di lingkungan kampus penulis terlibat menjadi Himpunan Mahasiswa Program Studi Jurusan Akuntansi Syariah dan di lingkungan masyarakat penulis menjadi Pembina dari remaja masjid yang ada di sekitar tempat tinggal penulis.

Email Penulis: Chindyaulia0206@gmail.com

BAB 4

PENGELOLAAN KEUANGAN LSM

Widya Putri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat kita ambil di sumber lembaga donor seperti nasional atau internasional, dana yang terima dari pihak luar negeri diatur berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Oleh karena itu, cara untuk meningkatkan penerimaan dana yang telah diperoleh dari berbagai pihak harus didasarkan pada pola prinsip agar nantinya tidak ada yang mencari keuntungan.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan tata buku yang telah berlaku. Dalam pembukuan keuangan LSM akan diperiksa dan ditinjau oleh organisasi dan pemberi dana. Oleh karena itu, dalam kewenangan penerimaan atau penyimpanan dan penggunaan dana beserta pembukuan keuangan. LSM yang telah dilaksanakan oleh para pelaku organisasi LSM yang ditentukan oleh badan penyandang dana yang berdasarkan status LSM yang dimaksud dalam anggaran LSM, yang telah disepakati oleh anggota LSM, yang diajukan kepada lembaga donor untuk dapat disetujui menjadi sebuah program atau proyek LSM.

Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya memiliki hubungan yang terletak pada bagaimana pengaruh siklus pada lembaga yang saling bersangkutan. Dalam siklus akuntansi biaya sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh siklus dalam kegiatan lembaga tersebut atau berupa transaksi yang dilakukannya. Dalam siklus suatu kegiatan LSM

Pengelolaan Keuangan LSM

dapat dimulai dengan cara pembelian barang sesuai dengan kebutuhan program dan tanpa harus melalui pengelolaan yang lebih lanjut dan sebuah transaksi LSM tidak akan pernah terlepas dari pembiayaan. Dalam sebuah pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian serta penafsiran informasi biaya tergantung kepada siapa sebuah proses tersebut diajukan. Sebuah proses akuntansi biaya LSM dapat diajukan untuk memenuhi kebutuhan (Bastian, 2007)

Dalam perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada berbagai kegiatan sosial yang terorganisir di Indonesia pada tahun 1970 yang mengesankan jika dilihat dari segi jumlah, keragaman, serta letak geografisnya. Dapat kita lihat pada akhir tahun 1960-an dan pada awal 1970-an terdapat sedikit sekali kegiatan sosial dan kelompok non-pemerintah yang aktif dalam memiliki rasa kepedulian dan kemampuannya untuk menangani masalah-masalah pembangunan, sekarang dapat dilihat keadaan tersebut sudah jauh berubah, dapat kita lihat dari berdirinya LSM.

Dapat dilihat dari sekian banyak LSM yang berkiprah dalam aksi pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Air muncul salah satu tipologi LSM dibentuk di lingkungan pesantren dengan cara melibatkan Kiai beserta para santri-santrinya sebagai tulang punggung organisasi. (Zubaedi, 2013)

Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh kelompok atau perorangan yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, tanpa mengharapkan imbalan dan keuntungan dari masyarakat. Dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal sebagai Organisasi Non Pemerintah (ONP). Dari instruksi menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

LSM yang dimaksud adalah sebuah organisasi atau Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang sukarela dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun tentang Yayasan, maka secara umum

Pengelolaan Keuangan LSM

2. Menyiapkan informasi tentang bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencatat kegiatannya.
3. Menyiapkan informasi yang dapat berguna dalam memperkirakan kemampuan lembaga.
4. Menyiapkan informasi tentang keadaan keuangan pada organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan perubahan di dalamnya.
5. Menyiapkan informasi seluruh yang berfungsi dalam memperkirakan kinerja lembaga atau organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk jasa, tujuan pencapaian, dan efisiensi.

Dalam laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menunjukkan peranan antisipasi dan menjanjikan yang menyiapkan informasi yang bertujuan untuk menaksir banyaknya sumber daya yang ditentukan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang diperoleh dari operasi berkelanjutan, dan akibat berasosiasi dan keraguan. Dalam laporan keuangan dapat juga menyiapkan informasi kepada penggunaanya, seperti:

1. Mengetahui apakah sumber daya sudah didapatkan dan di pakai sebanding dengan perkiraan yang telah ditentukan.
2. Mengetahui sumber daya yang telah diperoleh dan dipakai sesuai dengan ketentuan.

Dalam mencapai tujuan, laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat diatur dan disusun dengan dasar akrual. Dalam laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diatur dalam dasar akrual yang akan memberikan informasi kepada pengguna yang tidak hanya transaksi di masa lalu yang menyertakan penerimaan dan juga pembayaran kas di masa depan beserta sumber daya yang menandakan kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, lembaga ini diperkirakan tidak bermaksud atau bertujuan dan menekankan secara material skala pelayanannya. Dalam laporan keuangan yang diperoleh berupa laporan keuangan lembaga atau organisasi nirlaba yang berupa laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas yang digunakan dalam suatu periode pelaporan. (Bastian, 2007)

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit ERLANGGA.
- Nurfadhillah, S. (2021). *Mengenal Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Rachmawati, E. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: KENCANA.

PROFIL PENULIS



Widya Putri

Penulis bernama Widya Putri yang lahir pada Kamis, 16 Mei 2002/1423 Hijriah di Koto Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sekarang penulis bertempat tinggal di Negeri Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar penulis merupakan anak tunggal. Jenjang Pendidikan yang ditempuh penulis antara lain, TK Tanjung tahun 2008/2009, SDN 05 Tanjung tahun 2014/2015, MTsN 10 Tanah Datar tahun 2017/2018, SMAN 1 Sungayang angkatan 2020/2021. Saat ini penulis sedang melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi di sebuah Universitas Islam Negeri yaitu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan mengambil Program Studi S-1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) di kampus penulis lebih menggemari pelajaran yang bersifat teori dibandingkan dengan pelajaran praktek, sebelum menjadi mahasiswa di perguruan tinggi ini penulis mengambil jalur masuk UM-PTKIN, penulis merupakan angkatan tahun 2021 dan sekarang penulis sudah menginjak semester 4. Penulis juga aktif dalam kegiatan kampus dan jurusan seperti mengikuti beberapa kepanitiaan yang diselenggarakan oleh kampus maupun jurusan contoh kepanitiaan yang pernah diikuti penulis adalah kepanitiaan Olimpiade Akuntansi se Indonesia, kepanitiaan Fortadiksi, Kepanitiaan Taaruf Accounting dan lain-lain. Penulis pernah ikut webinar nasional, ikut dalam sosialisasi kepada masyarakat, ikut pelatihan.

Penulis memiliki hobi antara lain seperti membaca, menulis, belajar, dan lain sebagainya, penulis sangat tertarik dalam pembuatan buku ini karena penulis ingin menghasilkan karya yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain. Hal ini dapat dilihat dari cara penulis dalam merangkai dan menganalisa materi yang ada di dalam buku ini. Karena ini merupakan salah satu hobi dari penulis.

Email Penulis: widyaputri162002@gmail.com

BAB 5

PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Fahzilan Syahirah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Pengelolaan Keuangan Masjid

Masjid merupakan salah satu perserikatan sektor publik yang termasuk organisasi non laba (*nirlaba*), yang di dalam operasionalnya mengurus sumber daya yang dipunyai atau diterima secara ikhlas dan lancar dari warga. Memiliki tiga fungsi

1. Masjid menjadi tempat ibadah (*madlah*) juga merupakan tempat ibadah umum (*ghairu madhlah*) sepanjang dilakukan dalam batas-batas syariah.
2. Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid ini.
3. Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan manusia.

Masjid adalah sejenis organisasi nonlaba di bagian keagamaan. Organisasi nonlaba biasanya tidak memiliki kepemilikan serikat secara mutlak, karena organisasi nonlaba ini biasanya didirikan oleh berbagai orang atau kelompok. Modal untuk membangun organisasi nonlaba ini juga dapat diperoleh melalui modal eksternal. Pada saat yang sama, kebutuhan operasional dapat diperoleh dari penghasilan atau layanan yang diberikan. Oleh karena itu, hal ini mengarah pada fakta bahwa yang diukur jumlah dan kepastian arus kas menggambarkan metrik penting bagi pengguna laporan keuangan masjid (Al-atqiyah & Al-atqiyah, 2021).

Daftar Pustaka

- Al-atqiyah, M. B., & Al-atqiyah, M. B. (2021). *Penerapan isak no. 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada masjid besar al-atqiyah kecamatan moyo utara kabupaten sumbawa*. 3(2), 63–75.
- Kedungbanteng, K., & Banyumas, K. (2021). *Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas*. 21(3), 1249–1253. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>
- Manusia, S. D., Keuangan, L., & Yang, H. (2021). *Analisis faktor-faktor penghambat penerapan interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35 pada masjid al-ihsan*. 3(2), 45–52.
- Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). *Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja)*. 12(1), 206–215.
- Pengelolaan, A., Masjid, K., & Kota, S. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35*. 5, 118–135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>

PROFIL PENULIS



Fahzilan Syahirah

Penulis dilahirkan di Baruh Bukit, pada tanggal 02 November 2002. Penulis lahir dari orang tua yang sangat luar biasa yang bernama Taufik dan Verawati, penulis sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penulis sekarang menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar, dengan jurusan Akuntansi

Syariah, penulis memilih jurusan Akuntansi Syariah dengan tujuan agar bisa menjadi pengusaha sukses di masa nanti yang berlandaskan syariat islam. Sebelumnya penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 20 Sungayang, lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 Sungayang, setelah itu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Sungayang.

Penulis juga aktif di dunia organisasi baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Dalam organisasi di lingkungan kampus, penulis terlibat secara aktif di organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi jurusan Akuntansi Syariah, dalam organisasi ini penulis banyak belajar tentang bagaimana manajemen waktu yang baik, bagaimana menjadi manusia yang lebih sabar dan mempunyai banyak teman dari jurusan lain. Dalam lingkungan masyarakat penulis aktif menjadi remaja masjid dan karang taruna di tempat tinggal penulis.

Email penulis: fahzilansyahirah@gmail.com

BAB 6

PENGELOLAAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT

Salsabilla Marimer

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Fakta bahwa semua lembaga sektor publik, termasuk rumah sakit pemerintah, adalah nirlaba, dimiliki bersama, pemilik sumber daya, dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan operasi dibuat berdasarkan kesepakatan menjadikan mereka semua entitas ekonomi khusus. Rumah sakit harus meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat agar dapat bersaing karena merupakan mata rantai yang sangat penting dalam mata rantai rujukan pelayanan kesehatan yang berperan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, rumah sakit harus memenuhi perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dengan mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan memperhatikan prinsip ekonomi meskipun merupakan lembaga yang sangat kompleks, dinamis, kompetitif, multi disiplin, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ada desakan untuk menaikkan standar pelayanan, dan UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijalankan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (Dekrita, 2021)

3. Kelangsungan Hidup (*Viability*)

Kemampuan rumah sakit untuk bertahan hidup merupakan indikator tingkat keamanan dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Rencana keuangan yang menguraikan bagaimana rumah sakit dapat melaksanakan strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya harus disediakan oleh manajemen keuangan rumah sakit.

4. Keterbukaan (*Transparency*)

Rumah sakit harus terbuka dengan semua orang yang mungkin tertarik dengan informasi tentang niat dan tindakan mereka. Ini memerlukan pembuatan laporan yang tepat, menyeluruh, tepat waktu, dan sederhana untuk diakses oleh pihak manajemen yang berkepentingan.

5. Standar dan Pedoman Akuntansi (*Accounting standards*)

Sistem akuntansi dan keuangan rumah sakit perlu mematuhi standar dan pedoman akuntansi Indonesia.

6. Integritas (*Integrity*)

Keakuratan dan kelengkapan catatan keuangan merupakan aspek penting lainnya dalam menjaga integritas laporan dan catatan keuangan.

7. Pengelolaan (*Stewardship*)

Uang yang diperoleh harus dikelola dengan hati-hati dan digunakan oleh rumah sakit untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. (Dekrita & Samosir, Manajemen Keuangan Rumah Sakit, 2022)

Dalam menyusun laporan keuangan rumah sakit sebaiknya harus menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Menilai nilai entitas terkait layanan atau manfaat.
2. Tanggung jawab administrasi rumah sakit (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas dan laporan arus kas).
3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan).

4. Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas).

Berikut merupakan beberapa bagian dari laporan keuangan di rumah sakit:

1. Laporan posisi keuangan (aset, aset bersih; tidak disebut neraca).
2. Laporan aktivitas (pendapatan, pengeluaran, dan kerugian, dan perubahan aset bersih)
3. Arus kas dari operasi investasi, operasi, dan pembiayaan semuanya termasuk dalam laporan arus kas.
4. Catatan atas laporan keuangan menggunakan sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer, serta perubahan klasifikasi aktiva bersih.

Daftar Pustaka

- Deharja, A. S. (2021). *Buku ajar Praktik Klinis Rekam Medis (Pengantar Awal Turun Lapangan)*. Kediri: CV. Pelita Medika.
- Dekrita, A. Y. (2021). *Kinerja Keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Dekrita, A. Y., & Samosir, M. (2022). *Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Pekalongan, Jawa Tengan: PT. Nasya Expanding Management.
- Karim, A., Indarto, L. S., Dewi, S. M., Srihastuti, E., Hamdani, Hamzah, A., et al. (2021). *Pengenalan Dasar-dasar dalam Berbagai Bidang*. Cirebon: Insania.
- Latupeirissa, L. W. (2022). *Manajemen Rumah Sakit Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Yogyakarta: NEM.
- Mu'ah. (2014). *Kualitas Layanan Rumah sakit*. Sidoarjo Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Pratiwi, D. R., Putra, S. R., Amaliah, N., Mutia, N., Setiawan, H., Crismilasari, A. L., et al. (2022). *Manajemen Rumah Sakit (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Pratiwi, E., Anwar, A., & Rochika, M. M. (2022). *Quality Of Work Life dan Komitmen Organisasi Perawat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Setyawan, E. F., & Supriyanto, S. (2019). *Manajemen Rumah Sakit*. Sidoarjo Jawa Timur: Zifatama Jawara.
- Supriyanto, S., Wartiningih, M., Kodrat, D. S., & Djuari, L. (2023). *Administrasi Rumah Sakit*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Yunika, M. (2016). *Tata Kelola Keuangan Sektor Publik*. Jawa Barat: Goresan pena.

PROFIL PENULIS



Salsabilla Marimer

Salsa adalah nama penulis buku ini. Penulis lahir dari orang tua (*alm*) Maria Misdawati dan Metrial sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Nagari Simpang TJ Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 06 Juni 2002. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari SDN 02 Simpang TJ Nan IV (2009-2015), melanjutkan ke MTsN 3 Solok (2015-2018) dan SMAN 01 Danau Kembar (2018-2021), dan saat ini sedang menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis lahir dari keluarga yang berlatar belakang status sosial menengah ke bawah. Meskipun demikian, itu semua tidak menghalangi penulis untuk terus belajar dan menuntut ilmu supaya dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang sarjana. Selama masa hidupnya penulis pernah beberapa kali mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten seperti OSN, O2SN, FLS2N serta menjadi perwakilan peserta debat di tingkat Provinsi. Dalam keanggotaan organisasi penulis pernah menjadi anggota OSIS sekaligus pernah menjabat sebagai ketua MPK.

Buku ini penulis buat sebagai salah satu tugas mata kuliah wajib yaitu Akuntansi Sektor Publik. Dalam penulisan buku ini, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk mengungkapkan gagasan dan pendapat yang sinkron dengan topik pembahasan yang sedang penulis kaji.

Email Penulis: Chasalsabillakhey662@gmail.com

BAB 7

PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN

Repi Widia Sari

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Perkembangan Indonesia tidak lepas dari lembaga syariah yang berpedoman pada Alquran dan hadis, salah satunya pesantren. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita sudah tahu bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang banyak menitikberatkan pada pendidikan agama. Ilmu agama Islam memiliki lembaga pendidikan formal dan informal. Pelatihan formal karena ada pengajaran terorganisir dari tingkat dasar ke pilihan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan apa yang disebut pengajaran non-formal dapat dianggap sebagai pesantren di mana informasi tambahan tidak ditampilkan di sekolah-sekolah yang didanai pemerintah. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pendidikan diniyah agar santri dapat menjadi ahli agama Islam dan membangun masyarakat yang Islami.

Pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang merinci semua transaksi masuk dan keluar sebagai bagian dari tugas fidusia mereka. Kemudian, sesuai dengan pedoman akuntansi yang tepat, laporkan kepada donatur dana dan pihak terkait secara transparan dan akuntabel. Melalui pemberian informasi, keterbukaan menumbuhkan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua santri, dan warga pesantren yang hadir. Ini juga memastikan kenyamanan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi yang

harus dilakukan yang pertama RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), biasa disebut RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) atau RKAPP (Rencana Kegiatan Pondok Pesantren), dan RAPB (Rencana Anggaran Penerimaan Belanja), biasa disebut RAPBS (Rencana Anggaran Penerimaan Belanja dan sekolah), RAPBM (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah), atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren)

2. Pelaksanaan (*Accounting*)

Akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa dalam pelaksanaan keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan pondok pesantren yang diperoleh dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Misalnya penerimaan dana spp santri tercatat dalam buku penerimaan spp serta ada bukti penerimaan berupa kartu spp yang pegang oleh santri. Keduanya dilengkapi dengan buku administrasi penyetoran dan penerimaan spp, selain itu bila pondok pesantren yang dimaksud memiliki donatur tetap maka perlu disediakan buku penerimaan donasi. Pada proses pelaksanaan selain buku-buku tersebut ada buku utama yang wajib diisi setiap terjadi transaksi, yaitu Buku Kas Umum. Buku Kas Umum ini yang menggambarkan histori penerimaan dan pengeluaran dana pondok pesantren. Buku Kas Umum tersebut dilengkapi dengan dokumen Buku Kas yang berupa kuitansi, faktur, nota, atau catatan administrasi lainnya. Salah satu bukti Buku Kas yang berupa catatan administrasi ialah Buku Honorarium dan Intensif *Asatidz* dan *staf*.

3. Evaluasi (*Auditing*)

Seorang individu yang kompeten dan independen melakukan audit, yaitu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang

Pengelolaan Keuangan Pesantren

berkaitan dengan informasi terukur tentang entitas ekonomi untuk melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Sementara itu, Mulyasa menegaskan, pengawasan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah. Ketua pengurus pondok pesantren bertanggung jawab mengendalikan pengeluaran keuangan pesantren sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan dalam hal pengelolaan keuangan (HM, 2023)

Daftar Pustaka

- HM, K. (2023). *Manajemen Pesantren*. Jawa Tengah : Lakeisha.
- Puruwita, D. (2018). *Tata Kelola Keuangan Sektor Publik Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Saifuddin. (2023). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Wibisana, J. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Jakarta: Bank Indonesia.

PROFIL PENULIS



Repi Widia Sari

Penulis dilahirkan di Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23 Januari 2000. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Sihat dan Kaminar sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jorong Taruko, Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 31 Beringin Sakti Taluk (Tamat 2013), melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Lintau Buo Tigo Jangko (Tamat 2016) dan SMAN 2 Lintau Buo (Tamat 2019), hingga bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Alasan penulis memilih Jurusan Akuntansi Syariah di karenakan adanya ketertarikan terhadap ilmu Akuntansi sejak masih dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Jurusan IPS lebih tepatnya sejak tahun 2018.

Penulis juga aktif di dunia organisasi baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Dalam dunia organisasi di lingkungan kampus, penulis terlibat secara aktif menjadi Mahasiswa Himpunan Program Studi Jurusan Akuntansi Syariah dalam Bidang Akademik berjabat sebagai Koordinator Bidang Akademik dan dilingkungan masyarakat penulis aktif menjadi remaja islam disekitar tempat tinggal penulis.

Email Penulis: repiwidiasari230100@gmail.com

BAB 8

PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Siti Aissya

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan partai patut diawasi lantaran beberapa alasan, sistem kepartaian sangat penting menyangkut dalam sistem demokrasi politik, tidak mungkin tidak mengikutsertakan sistem politik yang ada sekarang ini . Mustahil ada sistem politik yang sudah demokratis tanpa punya sistem kepartaian. Beraneka tujuan dan fungsi parpol bisa dijelaskan untuk menjelaskan seberapa pentingnya pengaruh eksistensi partai politik sebagai sebuah keharusan, menjadi saluran partisipasi warga negara bukan hanya satu-satunya tujuan yang ingin dicapai oleh partai politik, namun ingin menyatukan kelompok dengan latar perorangan dan kelompok sosial yang berbeda ke dalam sistem politik.

Partai politik berperan banyak bukan saja dalam penyusunan kerangka calon pemimpin nasional, tetapi juga dalam perjuangan kebijakan publik alternatif, kebijakan publik berdasarkan berbagai aspirasi dan kepentingan yang diungkapkan dalam masyarakat. Karena itu, partai politik membutuhkan sumber daya untuk bertahan dan mempertahankan susunan paling dasar partai untuk mewakili rakyat, mengembangkan kemampuan untuk memilih dalam pemilu, dan terlibat secara kreatif dalam debat politik publik. Proses politik tidak dapat berlangsung tanpa sumber daya keuangan, partai politik tidak dapat mengatur dirinya sendiri, politisi tidak dapat mengatur

meningkatkan ketegasannya kepada partai politik ketika memberikan hukuman atau sanksi kepada partai politik yang tidak terbuka dan akuntabel dalam membuat laporan keuangannya”. Ucapan peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dibagian korupsi politik Apung Wadadi ketika melaksanakan jumpa pers di kantor IWC, Apung memberikan *statement* seperti hal tersebut dikarenakan merujuk pertimbangannya pada PP 05 Tahun 2009 perihal Bantuan Pembiayaan untuk parpol dimana terdapat dalam pasal 16 dinyatakan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dikatakan dalam pasal 13 perihal sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN dan APBD, sampai dengan diterimanya laporan oleh pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai politik harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN/APBD setahun sekali secara berkala kepada Pemerintah sehabis diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kita melihat laporan yang tidak terbuka dan akuntabel sudah lama terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya untuk itu untuk para partai politik dihimbau agar transparan dan akuntabel dalam melaporkan laporan keuangan yang benar-benar terjadi (Zuryani, Arjawa, & Dwiranda, 2016).

Pengeluaran Partai Politik

Pengeluaran kampanye pada awalnya terkait erat dengan sistem pemilu populer yang digunakan. Representasi proporsional multi-distrik (lebih banyak kursi per daerah pemilihan) dan sistem daftar terbuka memerlukan biaya pemilihan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem perwakilan proporsional multi-distrik dan sistem daftar tertutup kampanye. Disisi lain, di yang kedua sistem, hanya partai politik yang berkampanye. Penting untuk mengatur bagian atas dengan hati-hati

Batas pengeluaran, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Biaya pemilu yang berlebihan meninggalkan partai atau kandidat dengan kredit yang banyak. Itu harus dibayar pasca pemilihan melalui kebijakan khusus yang menguntungkan para kontributor besar ini (Surbakti & Supriyanto, 2011).

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Yogyakarta: Erlangga.
- P.Radikun, R., & Muslim, M. (2008). *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta Selatan: Transparency International Indonesia.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Zuryani, N., Arjawa, I. S., & Dwiranda, A. (2016). *Akuntabilitas Partai Politik*. Bali: Udayana University Pres.

PROFIL PENULIS



Siti Aissya

Penulis lahir di Medan, 12 November 2003, merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Sekolah Dasar di SDN 067251 MEDAN, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tanjung emas, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Batusangkar lalu melanjutkan kuliah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2021 dan mengambil Jurusan

Akuntansi Syariah dan sekarang berada di semester empat, menulis *book chapter* adalah pengalaman pertama bagi penulis dimana rasanya sangat senang, karena ini menjadi pengalaman yang sangat bagus, hal tersebut membuat penulis berusaha semaksimal mungkin dan terus bersemangat untuk segera bisa menyelesaikannya. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi serta dukungan untuk terus menyelesaikan *book chapter* ini, akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan *book chapter* tentang Pengelolaan Keuangan Partai Politik ini, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang yang membutuhkannya. Penulis juga sangat berterima kasih kepada keluarga penulis terutama kepada mamak penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan *book chapter* ini.

Email Penulis: sitiaisyah121123@gmail.com

BAB 9

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Agil Suryani

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'keuangan' diartikan sebagai seluk-beluk uang, urusan uang atau keadaan uang. Sedangkan Desa memiliki beberapa pengertian, yaitu kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa keluarga dengan pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa), kumpulan rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, desa atau dusun (dalam pengertian ini, sebuah pedalaman), tempat dan wilayah.

Menurut sejarah regulasi pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014, regulasi pengelolaan keuangan desa pada awalnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perkembangan yang dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Raharjo M. M., 2020)

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau uang dan barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan

Perencanaan artinya suatu aktivitas penyusunan pendapatan dan pengeluaran desa, berguna untuk sebuah kegiatan eksklusif pada kurun waktu yang akan tiba. Contohnya perencanaan pembangunan jalan akses desa, kira-kira berapa porto yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa, berapa penerimaan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota.

Secara umum, perencanaan keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan membuat perkiraan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018, dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa, perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa dipertimbangkan terkait anggaran yang dianggarkan dalam APBDes selama periode tertentu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah kegiatan yang direncanakan pada penyusunan *planning* Kerja Pemerintah (RKP) desa dan dianggarkan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan serangkaian tindakan untuk pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD. Menurut Peraturan No. 20 Tahun 2018, penyelenggaraan keuangan desa adalah seperangkat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur/Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah tindakan melakukan pencatatan atas seluruh pemasukan (pendapatan) dan pengeluaran (penggunaan) yang dianggarkan selama satu tahun. Hal tersebut, dicatat dalam artikulasi kas umum yang berfungsi sebagai penulisan seluruh transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berafiliasi menggunakan dana. Penatausahaan yaitu proses mencatat kegiatan keuangan desa menggunakan formulir atau dokumen atau

Pengelolaan Keuangan Desa

Harmonisasi Kades dan BPD yang sering bermasalah akibat dampak politik pasca pemilihan kepala desa atau sebab lainnya.

Dalam tahap pelaksanaan, area risikonya yaitu: Prinsip swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Kewajiban Perpajakan, dan masalah lain yang tidak diduga seperti bencana alam/sosial, perampokan ataupun korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun dalam tahap penatausahaan, area risikonya adalah: administrasi pembukuan berbagai macam dan jenis yang harus dipenuhi setiap waktu, kejujuran dan pemahaman dari pihak yang diberi tanggung jawab, pencatatan aset desa yang masih sering diabaikan, dan pemahaman terhadap konsep belanja modal dan belanja barang/jasa yang kadang tertukar.

Pada tahap pelaporan, jika wilayah risiko menjadi bagian dari laporan kepala desa (Januari/Maret setelah TA), maka diperlukan pelaporan terpadu. Harus dibuatkan laporan pengadaan barang/jasa, laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa juga dilampirkan.

Selain risiko pada pengelolaan keuangan desa adapun tantangan yang harus dihadapi baik dari internal desa maupun eksternal desa. Pada tantangan internal desa, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan desa untuk dikelola dalam APB Desa.
2. Porsi pengeluaran desa yaitu 70%:30%.
3. Kapasitas pengelola keuangan desa masih terbatas.
4. Kesulitan geografis setiap desa bervariasi mulai dari mudah, sedang dan sulit.
5. Ketidaktepatan (sasaran, tujuan, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
6. Masalah pelanggaran hukum yang semakin meningkat

Sedangkan tantangan eksternal dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota tidak berjalan maksimal.
2. Pendampingan masih belum optimal.

3. Kendala/masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan DD.
4. Tuntutan Desa (Pengaturan Siltap dan Tunjangan) yang masih sering terjadi.
5. Pengaruh kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan Bersama DD).
6. Pengaturan yang tumpang tindih dengan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.

Daftar Pustaka

- BPKP. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas.
- Estiningrum, I. G. (2022). *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Zunafriesma, H. B. (2022). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.

PROFIL PENULIS



Agil Suryani

Penulis dilahirkan di Padang Ganting, pada tanggal 11 September 2002. Penulis lahir dari orang tua yang sangat luar biasa yang bernama Alfiandri dan Wirmadona, penulis sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penulis sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Batusangkar, dengan jurusan Akuntansi Syariah, penulis memilih jurusan Akuntansi Syariah dengan tujuan agar bisa menjadi pengusaha sukses di masa depan nanti. Sebelumnya penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 06 Padang Ganting, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 13 Tanah Datar, setelah itu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Padang Ganting. Semasa sekolah, baik itu di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah atas penulis selalu memperoleh peringkat terbaik di kelas. Penulis juga pernah menjadi anggota OSIS di Sekolah Menengah Atas dan di jenjang perkuliahan penulis juga sering berpartisipasi menjadi kepanitiaan di setiap acara yang diselenggarakan di kampus. Dalam berpartisipasi penulis belajar banyak tentang cara manajemen waktu, serta memperoleh banyak teman dari jurusan lain. Dalam lingkungan masyarakat penulis aktif sebagai Remaja/i Islam di Masjid terdekat.

Email Penulis: suryaniagi11@gmail.com

BAB 10

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Suci Rahma Dani

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Latar Belakang

Berbagai pemerintah daerah telah bergabung membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan. Pembentukan BLUD oleh pemerintah daerah merupakan upaya penerapan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Reformasi pengelolaan keuangan negara menghasilkan pengelolaan keuangan BLUD. Terjadi transisi dari penganggaran berbasis input atau proses pembiayaan menjadi berbasis kinerja. BLUD memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangannya karena dapat menggunakan produktivitas dan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip ekonomi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini merupakan jaminan dari pengaturan administrasi keuangan negara pada umumnya.

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dari pengertian tersebut jelas bahwa BLUD didirikan untuk memberikan pelayanan masyarakat secara cuma-cuma. Selain itu, fleksibilitas mengacu pada pola pengelolaan keuangan yang adaptif dengan memanfaatkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tanpa mengejar keuntungan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengelolaan Keuangan BLUD

4. Kegiatan yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD.
5. BLUD harus mengutamakan kualitas pelayanan publik masyarakat serta efektifitas dan efisiensinya dalam melakukan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
6. Sebagai komponen penting dalam anggaran kerja untuk BLUD dan laporan kinerja, serta laporan keuangan serta kinerja pemerintah daerah, disiapkan dan disajikan.
7. BLUD memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan bagi masyarakatnya dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah

Pembinaan mengenai BLUD dilakukan baik pengelola metode maupun pengelola keuangan. Pengelolaan teknis dilakukan untuk SKPD terpaut, padahal pengelolaan keuangan dilaksanakan untuk pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Dengan penerapan penegakan dalam ketentuan kepala wilayah bisa didirikan dewan manajemen BLUD. Dalam pembentukan dewan manajemen BLUD hanya dikenalkan untuk BLUD terpilih bahwa mempunyai perwujudan anggaran pendapatan kotor per tahun yang dipenuhi perwujudan nilai serta anggaran modal untuk penimbang serta memiliki persyaratan minimum serta ditentukan bagi menteri keuangan.

Sebagai contoh petugas pengelola BLUD dan pegawai ketua dewan pengawas BLUD juga disediakan imbalan. Pengawas internal BLUD dilaksanakan untuk unit kerja yang disebut unit pemeriksaan internal serta memiliki kedudukan terus dibawah pimpinan BLUD. Sementara itu pengawas eksternal BLUD dilakukan untuk aparat pemeriksaan internal penguasa lebih jauh BLUD seimbang serta peraturan undang – undang namun tidak terbatas pada inspektorat provinsi / kabupaten/ kota atau badan pemerintah yang melakukan audit eksternal.

Daftar Pustaka

- Andia, y. (2019). *Kinerja Keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding management.
- Icuk Rangga Bawono, y. e. (2017). *Mengelola Keuangan BLUD Serial Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah 2017*. Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan BLUD*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murdayanti, Y. (2018). *Tata Kelola Keuangan Sektor Publik*. Jawa Barat : Goresan Pena .
- Rochmat Aldy Purnomo, D. A. (2022). *Penggalian Dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*. Ponorogo : Gracias Logis Kreatif.

PROFIL PENULIS



Suci Rahma Dani

Penulis dilahirkan di Baruh – Bukik, pada tanggal 23 Desember 2002. Penulis dilahirkan dari orang tua yang sangat hebat dan luar biasa yang bernama Endri Usman (Alm) dan Hairati, penulis sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jorong Baruh – Bukik, Nagari Andaleh Baruh- Bukik, kecamatan Sungayang, kabupaten Tanah Data, provinsi Sumatera Barat. Penulis sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Program Studi Akuntansi Syariah, penulis memilih jurusan Akuntansi syariah dengan tujuan agar bisa menjadi orang sukses dan membahagiakan orang tua dimasa depan nanti. Sebelumnya penulis pernah menempuh pendidikan di SD N 20 Baruh – Bukik, lalu melanjutkan di sekolah menengah pertama di SMP N 2 sungayang, setelah itu melanjutkan di sekolah menengah pertama SMA N 2 Sungayang.

Penulis juga aktif di dunia organisasi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Dalam organisasi lingkungan kampus, penulis terlibat secara aktif di organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, dalam mengikuti organisasi ini penulis banyak belajar tentang bagaimana manajemen waktu yang baik, bagaimana menjadi manusia yang lebih sabar dan mempunyai banyak teman di jurusan lain. Dalam lingkungan masyarakat penulis aktif menjadi remaja masjid dekat rumah.

Email Penulis: sucirdani23@gmail.com

BAB 11

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES

Rezika Dia Fitri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Terbentuknya UU Nomor 6 tahun 2014 merupakan permulaan dari berhasilnya pembangunan desa yang dilakukan dalam skala nasional menggunakan semangat “desa membangun” yang mengedepankan kemampuan desa dalam menggali kearifan lokal yang ditemukan di desa dan semangat bahu-membahu yang dimiliki warga desa tersebut. Mencari dan menggunakan kemampuan yang ada pada desa adalah sesuatu yang sangat diperlukan, karena dengan meletakkan perhatian lebih pada pertumbuhan ekonomi di desa jadi awal mula sebagai upaya meningkatkan kualitas perekonomian desa yang ada di seluruh sudut Indonesia.

Sekarang masyarakat desa menggunakan susunan yang telah ada memiliki wewenang utuh dalam menjalankan pembangunan desa menggunakan dana yang cukup banyak, didukung oleh asset dan potensi yang dimiliki desa tersebut dan seutuhnya menyusun aktivitasnya sendiri. Usaha yang dijalankan dalam menggerakkan perekonomian desa lewat kegiatan kewirausahaan desa, yang mana hal ini melahirkan suatu strategi dalam upaya meningkatkan ekonomian desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Hal tersebut dapat menjadi tugas besar untuk kementerian desa agar dapat menerangkan betapa substansialnya BUMDes pada semua desa yang terdapat di Indonesia. (Suleman dkk, 2020)

Konsep Dasar Organisasi BUMDes

1. Makna Singkat BUMDes

Badan usaha milik desa atau yang dapat disebut dengan BUMDes berdasarkan Permendagri No. 39 tahun 2010 menjelaskan bahwa BUMDes yaitu suatu lembaga yang pendiriannya diprakarsai oleh instansi pemerintah desa itu sendiri, yang mana dari segi kepemilikan modal serta segi tata kelolanya dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat bersama pemerintahan desa tersebut.

BUMDes adalah bentuk badan usaha milik desa yang dijalankan oleh pemerintah dengan masyarakat desa sebagai usaha untuk memperkokoh dari aspek ekonomi desa, dimana pembentukannya didasarkan pada kepentingan serta kapasitas desa tersebut. Jika dilihat pada UU Nomor 32 Tahun 2004 membahas pemerintahan desa yakni, desa bisa membentuk suatu badan usaha yang cocok dengan sumber daya serta kepentingan desa itu.

Bersamaan dengan penjelasan yang ada didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diatas, diterangkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, lalu pada Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam rangka memaksimalkan penghasilan desa dan masyarakat.

2. Peran BUMDes

Badan usaha milik desa ini didirikan untuk memenuhi kepentingan, potensi, serta daya tampung desa, dalam upaya penumbuhan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk atas dasar gagasan dari masyarakat desa. Sehingga, tujuan pendiriannya pun tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena potensi yang digunakan pun juga di prakarsai oleh masyarakat desa tersebut. Karenanya usaha yang nantinya akan didirikan itu dimulai dari kehendak masyarakat guna mewujudkan suatu perkembangan dilingkungan masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan pada BUMDes

Laporan keuangan BUMDes dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Laporan semester pertama
2. Laporan semester akhir tahun

Laporan keuangan untuk semester pertama berbentuk laporan realisasi APBDes (Anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes) paling lama dibuat pada akhir bulan juli. Sedangkan, untuk laporan keuangan semester akhir selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari untuk tahun sesudahnya, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Dana desa yang ditransfer lewat kas umum desa, semuanya merupakan pendapatan desa termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan APBDes dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa, sebab jabatannya memiliki wewenang dalam menyelenggarakan semua hal terkait pengurusan keuangan desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dari struktur desa dalam hal menjalankan pengelolaan keuangan.

Azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dalam pelaksanaannya, azas-azas ini tertuang di dalam salinan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa. Realisasi dalam melaporkan pemakaian Dana Desa yang dilakukan kepala desa untuk setiap desa pada Bupati/Walikota menyangkut disampaikan semester diterangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. (Ana Sopanah, 2023)

Daftar Pustaka

- HT., M. A. (2023). *Penguatan Bumdes Pilar Perekonomian Desa Terpencil*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Mustanir, S.I.P., M.Si, A., Razak, M.Si, I. R., & Mursalat, S.P.,M.Si, A. (2021). *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dimasa Pandemi Covid-19*. Jawa Barat: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sopnah, A., Fatoni, I., & Danawanti, M. O. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: SCOPINDO.
- Sopannah, A., Kurniawati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: SCOPINDO.
- Suleman, A. R., Revida, E., & Soetijono, I. K. (2020). *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.

PROFIL PENULIS



Rezika Dia Fitri

Penulis bernama Rezika Dia Fitri, lahir di Batusangkar pada 19 Januari 2003. Penulis bertempat tinggal di nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikan penulis yaitu, TK Dharma Wanita Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SDN 09 Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru dan lulus pada tahun 2015, untuk sekolah menengah pertama di SMPN 03 Sungayang tamat pada tahun 2018, SMAN 1 Sungayang angkatan tahun 2021.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan studi S1 pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis lolos untuk pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur UM-PTKIN. Sebenarnya tidak ada alasan khusus penulis memilih prodi ini, penulis tertarik pada pekerjaan sebagai seorang akuntan. Karena akuntan sangat banyak dibutuhkan baik oleh perusahaan, di bank atau pun di lembaga pemerintahan. Saat ini penulis sudah di masuk tahun kedua di kampus. Dan untuk merealisasikan hal tersebut penulis memilih prodi Akuntansi Syariah untuk memperdalam ilmu dibidang akuntansi.

Email Penulis: rezikadiafitri@gmail.com

BAB 12

PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA ZIS

Fani Adelia Listin

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Definisi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Secara terminologis, zakat adalah pemberian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada mereka yang memiliki hak atas zakat tersebut. Disisi lain, zakat seperti yang disyaratkan oleh fikih, adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan untuk mentransfer harta manusia yang mampu dan menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya sesuai kaidah yang ditetapkan Allah SWT dan juga menurut Syariah (Anshori, 2006:12). Menurut PSAK no 109, zakat ialah penghasilan yang diberikan wajib zakat menurut aturan Islam dibagikan untuk mereka yang memiliki hak untuk memperolehnya (mustahik). Selain itu Zakat juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan seorang muslim atau perusahaan yang diberikan kepada mereka yang berhak untuk memperolehnya sesuai hukum syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Infaq menurut terminologis berarti mengeluarkan harta untuk ketaatan, tawaduk dan cinta terhadap Allah SWT. Selain itu juga berupa rasa berterima-kasih terhadap pendapatan yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Disisi lain Shadaqah berarti semua bentuk anugerah/perbuatan yang bermaksud untuk mendapatkan balasan Allah SWT. Sedekah mempunyai dimensi yang sangat luas, bukan cuman berupa harta saja, akan tetapi juga bisa melakukan hal baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Padahal sedekah itu

3. Dana Tidak Halal

- a. Persetujuan non-halal berarti persetujuan atas semua kegiatan tidak halal sebanding dengan hakikat Islam, termasuk penerimaan simpanan maupun bunga yang diwajibkan bank tradisional. Persetujuan tidak halal aktif biasanya terjalin ketika situasi genting maupun non-darurat Yang masyarakat Syariah inginkan karena pada dasarnya dilarang.
- b. Pendapatan tidak halal dilegalkan sebagai aset tidak halal yang berperai-perai atas harta zakat, dana infak/sedekah dan harta amil. Harta yang tidak dibolehkan yang dibagikan menurut syariah (Rahman, 2015).

Daftar Pustaka

- Hariato, S. (2021). *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: untuk organisasi pengelola Zakat*. Bandung: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA).
- Nurul Ikhsanti, A. S. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (PSAK 109). *Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, 151-154.

PROFIL PENULIS



Fani Adelia Listin

Penulis dilahirkan di Barulak, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Agustus 2002. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Desi dan Dasril sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penulis pernah menempuh pendidikan dimulai dari SDN 10 Tanah Datar dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah ke MTsN 14 Tanah Datar (dulu MTsN koto nan tuo) dan tamat pada tahun 2018, dan juga di MAN 2 Payakumbuh tamatan tahun 2021. Hingga pada saat ini alhamdulillah bisa menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis aktif di dunia organisasi baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Penulis juga memiliki hobi menulis sejak menduduki bangku pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dari hobi tersebut penulis pernah menerbitkan beberapa buku antologi terkait cerpen dan juga puisi. Apabila pembaca ingin mengenal lebih mendalam mengenai kehidupan penulis, para pembaca bisa menghubungi penulis melalui akun media sosial penulis (@faniadhelia05).

Email Penulis: adeliafani50@gmail.com

BAB 13

VALUE FOR MONEY

Silvia Febriyanti

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Sektor publik sering dipandang sebagai sarang pemborosan, inefisiensi, dan organisasi yang merugi. Persyaratan baru telah muncul bagi organisasi sektor publik untuk mempertimbangkan *value for money* saat menjalankan operasinya. Pengertian akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dapat dipahami sebagai suatu proses teknis analisis akuntansi yang digunakan untuk mengkategorikan dana publik.

Uang adalah suatu benda atau alat yang sudah diakui masyarakat maupun negara untuk dijadikan sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang maupun jasa. Uang juga diartikan sebagai alat yang dapat memudahkan kegiatan dalam bertransaksi, baik itu transaksi jual beli berupa barang maupun jasa. (Harian, 2021).

Value for money adalah ide manajemen untuk organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kelompok yang berfokus pada kegiatan publik dikenal sebagai kelompok sektor publik. Kelompok ini biasanya tidak mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utamanya karena berorientasi pada kepentingan umum. Proses manajemen, bagaimanapun masih ada di perusahaan sektor publik secara keseluruhan.

Jika sebuah perusahaan menggunakan sumber daya paling sedikit untuk menghasilkan jumlah *output* terbesar untuk memenuhi

- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efisien.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Menurut Mahsun (2006), kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efektif.

Daftar Pustaka

- Alisa. (2021). *Pengertian, fungsi, sejarah, dan jenis-jenis uang*. Jakarta: Gramedia blog. Retrieved from Gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-jenis-uang/>
- Entrepreneur, j. (2023). *Arti Value for Money: Manfaat indikator dan cara mengukurnya*. jakarta: jurnal entrepreneur.
- Harian, K. (2021, Desember kamis). *contoh nilai nominal uang: nilai intristik, nilai internal, dan nilai eksternal*. Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/kabar-harian/contoh-nilai-nominal-uang-nilai-intristik-nilai-internal-dan-nilai-eksternal-1x7ApqlR33r/4>
- Mardiasmo. (2018). *akuntansi sektor publik*. jakarta: ANDI yogyakarta.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press.

PROFIL PENULIS



Silvia Febriyanti

Penulis Lahir di Pati, 14 Februari 2003, anak pertama dari 2 bersaudara. Menjadi bagian dari keluarga besar UIN Mahmud Yunus Batusangkar sejak 2021, sudah tertarik pada penulisan sebuah buku maupun buku cerita sejak 2015 lalu, dari pembuatan cerpen dan juga novel, kemudian hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk berpartisipasi dalam pembuatan buku akuntansi sektor publik, yang dibimbing langsung oleh dosen kampus dan juga para penerbit buku, hal tersebut membuat penulis bersemangat untuk lebih rajin lagi menyelesaikan pembuatannya yang akan segera diterbitkan.

Penulis juga berharap semoga buku yang nantinya dihasilkan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan beberapa orang yang memang membutuhkan dengan khusus adanya buku ini, dengan rasa hormat dan juga keteguhan hati penulis, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para dukungan baik itu dari keluarga, teman-teman dekat, dan seluruh teman-teman kampus yang telah memberikan banyak dukungan dan senantiasa menemani penulis dalam penyelesaian buku ini.

Email Penulis: Silviafebriyanti48@gmail.com

BAB 14

KONSEP *BALANCED SCORECARD*

Anggy Marsely

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Konsep manajemen kinerja yang banyak diaplikasikan oleh organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan adalah *Balanced Scorecard*. Konsep *Balanced Scorecard* ini awalnya banyak digunakan oleh organisasi-organisasi bisnis, seperti perusahaan besar yang berada di Negara Amerika Serikat. Setelah dinilai ternyata konsep *Balanced Scorecard* ini cocok digunakan pada organisasi-organisasi seperti organisasi sektor publik karena konsep

Balanced scorecard ini memusatkan terhadap segala bagian, seperti aspek kuantitatif-*financial* dan kualitatif-non *financial*. Perihal tersebut serupa dengan organisasi sektor publik yang tujuannya meletakkan keuntungan tidak hanya menjadi tolak ukur terhadap kinerja utamanya, tetapi juga bersifat kualitatif dan nonkeuangan sebagai pelayanannya. Sekalipun *Balanced Scorecard* ini berkembang pada organisasi bisnis, sektor publik ini dapat mengangkat berbagai transformasi terhadap konsep *Balanced scorecard*.

Pengambilan aksi dan kiat manajemen organisasi swasta terhadap organisasi sektor publik yaitu searah dengan *New Public Management*. *Balanced Scorecard* ini diambil terhadap suatu kelompok yaitu kelompok sektor publik agar dapat menaikkan kemampuan yang diperoleh oleh organisasi sektor publik, berdasarkan kejadian di perusahaan-perusahaan besar ketika menggunakan konsep *Balanced Scorecard* ini membuktikan

Konsep *Balanced Scorecard*

	<ul style="list-style-type: none">● Pembaharuan secara berkelanjutan pada peralatan	
Pertumbuhan dan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">● lanjutan dan pelatihan pada Pendidikan● pengetahuan perpustakaan● Gaji pegawai yang ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none">● Aspek pendidikan serta pelatihan internet dan jaringan● Aspek pendidikan dan pelatihan akuntansi komputer● program untuk pegawai seperti program pendidikan S2

Sumber: (Mahmudi, 2015)

Tahap Penganggaran pada *Balanced Scorecard*

Pada manajemen strategis setelah menyusun program pada *Balanced Scorecard* tahap selanjutnya yaitu penganggaran. Pada tahap pembuatan pemrograman, kebutuhan yang dibutuhkan oleh program-program dalam sumber daya maupun investasinya sudah diperhitungkan. Berdasarkan rencana keuangan yang berjangka panjang dalam pembuatan program itu membutuhkan waktu lebih satu tahun. Sedangkan, pada rencana jangka pendek, waktunya hanya satu tahun. Dapat dikatakan bahwa pemrograman yang sudah disetujui pada tahap pemrograman dan akan digunakan untuk menyusun anggaran tahunan itu berkaitan dengan tahap pemrograman dengan penganggaran. (Mahmudi, 2015)

Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Koesomowidjojo, S. R. (2017). *Balance Scorecard*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Anggy Marsely

Penulis lahir di Batusangkar pada 22 Maret 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 28 Buluh Kasok pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di MTsN 6 Tanah Datar dan SMA Negeri 1 Pariangan pada tahun 2018 dan 2021. Sekarang penulis tengah menempuh studi strata satu semester empat di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan mengambil konsentrasi pada bidang peminatan Akuntansi Syariah. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam. Saat itu penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pariangan dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Pengalaman organisasi penulis di kampus sebagai koordinator bidang kominfo (komunikasi dan informasi) pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah, serta anggota kepanitiaan di beberapa acara kampus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga sebagai Kader dan anggota dari organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa dan komunikasi serta Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Email Penulis: anggyarsely22@gmail.com

BAB 15

AKUNTABILITAS LEMBAGA PUBLIK

Sri Delvianas

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akbar dalam Edowai (2021) berpendapat bahwa era reformasi berdampak pada tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pembangunan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan komponen integral dari tata pemerintahan yang baik. Ketika diterapkan pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka secara logis mengikuti. Kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui penerapan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah berdampak pada akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban bagi mereka yang melaksanakan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan tentang langkah-langkah keputusan dan proses yang dilakukan, kemudian dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya. (Edowai, 2021)

Akuntabilitas sering diartikan dalam berbagai cara. Karena ada harapan tak terucapkan untuk perilaku PNS, harapan ini berkembang menjadi kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana karyawan lain berperilaku di dalam perusahaan dan bahkan bagaimana aturan formal disusun. Akuntabilitas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah serta oleh aparatur birokrasi. (2015) (Dwiyanto). Usman berpendapat dalam Paranoan (2022) bahwa

Akuntabilitas Lembaga Publik

penerapannya. Karena itu yang dinamakan akuntabilitas antisipatif. Akuntabilitas antisipatif mensyaratkan pejabat publik harus mempersiapkan perubahan akuntabilitas lingkungannya.

Selain kesulitan terkait dengan tanggung jawab hukum, temuan analisis yang dilakukan sebagai berikut juga dapat memberikan peluang:

- a. Kemungkinan makna mandat di bidang-bidang yang mereka izinkan untuk kebijaksanaan administratif
- b. Kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang dibutuhkan oleh persyaratan
- c. Kemungkinan hasil dari kemajuan informasi dan teknologi yang memungkinkan pelaporan yang cepat dan efektif bila diperlukan. (Sangkala, 2022)

Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi Indonesia

Jika tidak ada saluran komunikasi, akuntabilitas tidak akan tercapai. Alat akuntabilitas yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional atau Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional atau Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional atau Daerah, Rencana Strategis (Restra) untuk setiap Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS
2. Perjanjian Kinerja. Terhitung sejak 1 Januari 2014 telah ditetapkan kontrak kerja pegawai untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Laporan kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKPI) yang meliputi pertanggungjawaban keuangan, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta kesepakatan perencanaan dan kinerja untuk tahun tertentu. (Dwiyanto, 2015)

Daftar Pustaka

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Berkah Utami.
- Koisin, E., & Lalamaflu, P. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., & Allo, E. L. (2015). *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Paranoan, S., Herawati, T., Yanuarisa, Y., Kantohe, M. S., Usman, E., Priliandani, N. I., et al. (2022). *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Patarai, M. I. (2015). *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca.
- Sangkala. (2022). *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik*. Unhas Press.
- Sayekti, S., Madya, W. A., & Pusdiklat . (2020). *Akuntabilitas Kinerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. Jakarta Timur.
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2016). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesenjangan Masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional.

PROFIL PENULIS



Sri Delvianas

Nama Lengkap penulis adalah SRI DELVIANAS. Jenis kelamin perempuan. Penulis dilahirkan di Jakarta, 01 Oktober 2002. Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dan dari Pasangan Nasrul dan Andri Maiti. Penulis tinggal di alamat pandam, saruaso barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 07 Kubang Landai, Jorong Kubang Landai (lulus pada tahun 2015), melanjutkan ke SMP N 3 Tanjung Emas (lulus pada tahun 2019), dan SMK N 1 Batusangkar , dengan jurusan Akuntansi (lulus pada tahun 2021). Sehingga bisa menempuh masa kuliah di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dengan program studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ketertarikan penulis memilih program studi Akuntansi Syariah karena penulis mau menjadi seorang akuntan.

Buku ini dibuat penulis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Dosen pengampu ibuk Sri Adella Fitri S.E, M.Si. Dari sini penulis menunjukkan ketertarikan untuk membuat buku lagi. Tetapi, penulis masih banyak-banyak belajar dalam merangkai kata. Dari tugas buku ini penulis sebagai mahasiswa diajarkan untuk tidak mencontek atau mengcopy paste karya milik orang lain. Ini merupakan bentuk karya pertama penulis membuat buku.

Email Penulis: sridelvianas0110@gmail.com

BAB 16

ANALISIS RASIO KEUANGAN LEMBAGA SEKTOR PUBLIK

Silvia Rahnila

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Sektor Publik

Secara simpel, sektor publik (*public sector*) ditafsirkan suatu entitas yang dimana kegiatannya terkait dalam upaya menghasilkan barang atau jasa publik bagi warga umum, dimana sumber dana yang berasal dari iuran dan pemasukan negara lainnya, dimana banyak aktivitasnya ditata dalam ketentuan atau peraturan. (Murdayanti, 2016) Sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi melainkan juga faktor politik dan sosial. (Mulyono, 2022)

Broadbent dan Guthrie (1992) mendefinisikan sektor publik dari dua segi yaitu kegiatan dan juga kepemilikan. Sektor publik dari segi kegiatan yang dimana seluruh kegiatan atau aktivitasnya dimodali oleh pihak pemerintah atau negara, yang mana modal tersebut berasal dari iuran pajak maupun penerimaan negara lainnya, dan juga yang berasal dari kewajiban atau liabilitas. Kegiatan yang dilangsungkan oleh sektor publik adalah jasa yang bersifat monopolistik, dilihat sebagai dari kebutuhan masyarakat. Sektor publik dari segi kepemilikan ialah segala sesuatu yang menjadi milik masyarakat atau masyarakat umum, bukan pemegang saham atau sekelompok orang. Lembaga sektor publik dalam kegiatannya tidak mencari untung ataupun laba, maka dari itu lembaga ini disebut lembaga Nirlaba. (Rai, 2008)

- b. minimum 2,5 *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Perbandingan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemasukan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan jumlah pokok jatuh tempo, bunga, dan beban pinjaman lainnya adalah inti dari DSCR.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

2. Pengaturan Mengenai Penggunaan Uang Muka

- a. Utang jangka panjang dimanfaatkan untuk memodali proyek-proyek yang berpotensi menciptakan pengembalian untuk pengembalian utang dan layanan masyarakat.
- b. Utang jangka pendek untuk mengelola *cash flow*. (Murdayanti, 2016)

Daftar Pustaka

- Mulyono, R. D. 2022. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Murdayanti, Y. 2016. *Tata Kelola Keuangan Sektor Publik*. Jawa Barat : Goresan Pena.
- Nofrivul. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Rai, I. G. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Silvia Rahnila

Penulis dilahirkan di Koto Tengah, kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah Datar pada Senin, 23 Desember 2002. Penulis lahir dari pasangan Sarifudin dan Eka Sriyanti anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Islam Nurul Jadid, Bengkong Laut, Batam tamat pada tahun 2009, dan melanjutkan di SDN 003 Bengkong Laut, Batam dan tamat tahun 2015 dan menaiki jenjang menengah pertama yaitu di MTsN 1 Batam tamat pada tahun 2018 dan jenjang menengah akhir di

SMKN 2 Batam pada jurusan Akuntansi tamat pada tahun 2021. Kini penulis sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program Studi Akuntansi Syariah. Penulis memilih jurusan Akuntansi Syariah karena penulis sudah sejak SMKN yang dimana jurusan penulis ialah Akuntansi maka dari itu penulis sudah memiliki ilmu dasar tentang Akuntansi.

Penulis juga aktif di dunia organisasi baik dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Dalam dunia kampus penulis ikut andil dalam kegiatan kampus menjadi bagian panitia, peserta dan pengisi acara pada kegiatan kampus baik kegiatan program studi maupun Fakultas. Pada lingkungan masyarakat penulis aktif menjadi Remaja Islam di sekitar tempat tinggal penulis dan menjadi anggota Pelatihan Paskibra Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

E-mail Penulis : silviarahnila2312@gmail.com

AKUNTANSI LEMBAGA PUBLIK

Organisasi yang berorientasi non laba merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan dan program-program untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Organisasi non laba memiliki jenis dan kategorinya, ada yang bergerak dibidang keagamaan seperti masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya, bidang pendidikan seperti sekolah negeri, jasa kesehatan seperti klinik kesehatan dan rumah sakit, bidang politik seperti partai politik, bidang sosial seperti LSM, NGO yang bergerak dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan perundang-undangan, organisasi yang membela buruh atau serikat buruh, asosiasi/organisasi profesional, institusi riset, museum, dan lain-lain.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab, yaitu: Akuntansi Organisasi Nirlaba, Prinsip-prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba, Pengelolaan Keuangan Yayasan, Pengelolaan Keuangan LSM, Pengelolaan Keuangan Masjid, Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit, Pengelolaan Keuangan Pesantren, Pengelolaan Keuangan Partai Politik, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan BLUD, Pengelolaan Keuangan BUMDesa, Pengelolaan Keuangan Lembaga ZIS, Konsep *Value For Money*, Konsep *Balance Scorecard*, Akuntabilitas Lembaga Publik, Analisis Rasio Keuangan Lembaga Publik.

